

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PADA PENGUSULAN PROGRAM DAN
ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI
APLIKASI *E-PROPOSAL* PADA UNIT KERJA DIREKTORAT
JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN)**

Disusun Oleh:

Nama : Iskandar Dedy Utomo
NPM : 1931108213
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNISK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2023



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PADA PENGUSULAN PROGRAM DAN
ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI
APLIKASI *E-PROPOSAL* PADA UNIT KERJA DIREKTORAT
JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Oleh

**NAMA : ISKANDAR DEDY UTOMO
NPM : 1931108213
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : APN**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNISK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

NAMA : Iskandar Dedy Utomo
NPM : 1931108213
JURUSAN : Administrasi Publik
PROGRAM STUDI : Administrasi Pembangunan Negara
JUDUL : Implementasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Pertanian Berbasis Elektronik
(Studi Kasus Pada Pengusulan Program dan
Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Aplikasi
E-Proposal Pada Unit Kerja Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Kementerian Pertanian)


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 14 September 2023


Dr. Bambang Giyanto, M.Pd


LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN


Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta pada **31** Oktober 2023

 Ketua merangkap Anggota
(Dr. Edy Sutrisno, M. Si)

Sekretaris merangkap Anggota


(Alif Aji Nugroho, S.A.P., M.P.A.)

Anggota


(Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iskandar Dedy Utomo
NPM : 1931108213
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis Elektronik (Studi Kasus Pada Pengusulan Program dan Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Aplikasi *E-Proposal* Pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian) merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 14 September 2023



Iskandar Dedy Utomo

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERBASIS ELEKTRONIK (STUDI KASUS PADA PENGUSULAN PROGRAM DAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI APLIKASI E-PROPOSAL PADA UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana terapan di Bidang Administrasi Publik pada Politeknik STIA LAN Kampus Jakarta. Harapannya semoga skripsi ini berguna bagi para *civitas akademis* dan pengambil kebijakan di Pemerintahan yang membutuhkan sehingga kandungan skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Bambang Giyanto, M.Pd, atas bimbingan dan kesabarannya selama proses penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia kampus Jakarta beserta jajarannya, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menulis skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama peneliti menempuh pendidikan pada Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta.

3. Bapak/Ibu Key Informan yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data selama proses penelitian ini.
4. Bapak Ir. Bambang Pamuji, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ibu Putri Kartika, SE, M.Si selaku Koordinator Perencanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Muhamad Yusup, STP selaku atasan langsung, rekan kerja Sub Kelompok Program.
5. Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang sudah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan wawancara dengan staf jajarannya.
6. Erlinda Chaniago selaku istri yang sudah banyak memberikan dukungan dan inspirasi selama proses penelitian skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semua pihak yang disebutkan di atas dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu disini, Amin.

Jakarta, September 2023
Peneliti

Iskandar Dedy Utomo

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN BERBASIS ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PADA PENGUSULAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BANTUAN PEMERINTAH MELALUI APLIKASI *E-PROPOSAL* PADA
UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN)

Nama : Iskandar Dedy Utomo/1931108213
Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Giyanto, M. Pd

Abstract

Government assistance is one way for the state to be present and help the needs of the community, one of which is the agricultural sector which is an important sector in meeting national food needs. The initial process in distributing government assistance is the planning stage, in this context it is proposing government assistance programs and budgets through the e-Proposal application. In its implementation, it cannot be separated from problems, namely: 1. Every year the e-Proposal application is required to be able to adapt and be able to answer existing challenges; 2. There are frequent changes in e-Proposal operators in the regions, thus hampering proposals; 3. Lack of coordination and communication between related parties; 4. There was a malware attack on the Ministry of Agriculture server; 5. Illogical proposals. The aim of this research is to determine the implementation of this policy. The research method used in this research is qualitative with interview, observation and document review methods. The results of the research can be stated that in general the policy has been implemented although there are still several areas that need to be improved in its implementation. Recommendations that researchers can convey to the government include: 1. Proposing a revision of Minister of Agriculture Regulation Number 41 of 2014 concerning Guidelines for e-Planning Based Agricultural Development Planning to adapt to current conditions; 2. Increase socialization and intensity of communication across organizations and across fields; 3. Provide a budget to provide additional incentives for operators; 4. Strengthen servers for database security; 5. Create a stock program policy for equality and justice.

Keywords: *e-proposal;insentive;stock program;communications*

Abstrak

Bantuan Pemerintah merupakan salah satu cara negara untuk hadir dan membantu kebutuhan masyarakat, salah satunya pada sektor pertanian yang merupakan sektor penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Proses awal dalam penyaluran Bantuan Pemerintah adalah tahap perencanaan, dalam konteks ini adalah pengusulan program dan anggaran bantuan pemerintah melalui aplikasi *e-Proposal*. Dalam implementasinya, tidak terlepas dari permasalahan yaitu antara lain: 1. Aplikasi *e-Proposal* setiap tahunnya dituntut dapat menyesuaikan dan dapat menjawab tantangan yang ada; 2. Sering terjadi pergantian operator *e-Proposal* di daerah sehingga menghambat pengusulan; 3. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait; 4. Terjadi serangan *malware* pada server Kementerian Pertanian; 5. Usulan yang tidak logis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa secara umum kebijakan tersebut sudah berjalan walaupun masih ada beberapa daerah yang harus ditingkatkan dalam implementasinya. Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan untuk pemerintah antara lain adalah: 1. Mengusulkan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *e-Planning* untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini; 2. Meningkatkan sosialisasi dan intensitas komunikasi lintas organisasi dan lintas bidang; 3. Menyediakan anggaran untuk memberikan insentif tambahan bagi operator; 4. Memperkuat server untuk keamanan *database*; 5. Membuat kebijakan *stock program* untuk pemerataan dan keadilan.

Kata Kunci: e-proposal; insentif; stock program; komunikasi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	21
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
1. Tujuan Penelitian	21
2. Manfaat Penelitian	22
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori	24
1. Tinjauan Kebijakan	24
2. Tinjauan Teori	28
B. Konsep Kunci	52
C. Kerangka Berpikir	54
D. Pertanyaan Penelitian	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	56

B.	Teknik Pengumpulan Data.....	56
1.	Wawancara	57
2.	Observasi.....	60
3.	Telaah Dokumen.....	60
C.	Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.....	60
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
A.	Penyajian Data	63
B.	Pembahasan	69
1.	Implementasi Kebijakan	69
2.	Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	90
3.	Strategi Untuk Mengatasi Permasalahan Kebijakan	67
C.	Sintesis Pemecahan Masalah.....	102
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	105
1.	Aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	105
2.	Aspek Komunikasi Antar Organisasi dan Karakteristik Badan Pelaksana	106
3.	Aspek Sumber Daya Kebijakan	107
4.	Aspek Sikap Para Pelaksana	108
5.	Aspek Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	109
B.	Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA.....	112

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
1 Program/Kegiatan/Komponen Ditjen Tanaman Pangan TA. 2020	4
2 Rincian Output Ditjen Tanaman Pangan TA. 2021	5
3 Contoh Usulan <i>e-Proposal</i> dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang TA. 2020	10
4 Contoh Usulan <i>e-Proposal</i> dari Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa TA. 2020	10
5 Contoh Usulan <i>e-Proposal</i> Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Provinsi NTB TA. 2019	11
6 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan <i>e-Proposal</i>	12
7 Mekanisme Pelaksanaan <i>e-Proposal</i> Kementerian Pertanian	46
8 Key Informan	58
9 Sandingan Usulan <i>e-Proposal</i> Termin I dan Alokasi Revisi DIPA I TA. 2023	65
10 Contoh Usulan <i>e-Proposal</i> Termin II TA. 2023 lingkup Provinsi Banten	67
11 Contoh Usulan <i>e-Proposal</i> Termin I TA. 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	68

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
1 Tampilan <i>Log-in</i> aplikasi <i>e-Proposal</i> Kementerian Pertanian	8
2 Tampilan Halaman Depan <i>e-Proposal</i> pada Sistem BIMA	9
3 Skema Penyusunan Program, Anggaran dan Kegiatan Pembangunan Pertanian	28
4 Proses kebijakan publik menurut Thomas R. Dye	31
5 Tahap-tahap Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn	33
6 Kerangka Berpikir atau Model Berpikir	54
7 Proses <i>e-Planning</i> di Kementerian Pertanian	71
8 Sosialisasi Mekanisme Penilaian <i>e-Proposal</i> Tahun 2023 dan Penyusunan Matrik Rancangan Kegiatan Tahun 2024	74
9 Alur Proses Penilaian Usulan <i>e-Proposal</i>	77
10 Sosialisasi <i>e-Proposal</i> tahun 2020 untuk perencanaan TA. 2021	80
11 Sosialisasi <i>e-Proposal</i> tahun 2020 untuk perencanaan TA. 2021	81

DAFTAR SINGKATAN

CPCL	:	Calon Petani Calon Lokasi
MS	:	Memenuhi Syarat
RKAK/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PATB	:	Perluasan Areal Tanam Baru
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
BIMA	:	<i>Business Intelligence Management Agriculture</i>
BA	:	Berita Acara
SOP	:	<i>Standar Operating Prosedures</i>
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan
APBD	:	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
ABT	:	Anggaran Belanja Tambahan
LMDH	:	Lembaga Masyarakat Desa Hutan
UPJA	:	Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
BUMP	:	Badan Usaha Milik Petani
UPTD	:	Unit Pelayanan Teknis Daerah
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
RAKER	:	Rapat Kerja
RDP	:	Rapat Dengar Pendapat
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
KEP	:	Kelembagaan Ekonomi Petani
BPPSDMP	:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
PC	:	<i>Personal Computer</i>
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
DPR-RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
PMK	:	Penyakit Mulut dan Kuku
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
TLHP	:	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang berproses untuk mewujudkan suatu tujuan yang diharapkan. Dalam kondisi tertentu, dampak pembangunan dapat menciptakan ketidakberdayaan bagi sebagian masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan kelompok miskin. Hal ini sering terjadi pada sektor pertanian. Analogi yang sama dapat dengan mudah dijumpai di sektor pertanian Indonesia yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang sangat berlimpah, tetapi petaninya merupakan konstituen terbesar masih terjerat kemiskinan struktural (Bustanul Arifin, 2005).

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pertanian memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun

2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika Serikat (Renstra Kementan 2020-2024, 2020).

Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar. Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Kementerian Pertanian telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan program-program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Program-program tersebut antara lain Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) padi, jagung dan kedelai, bantuan Alat dan Mesin Pertanian, Peningkatan intensifikasi, peningkatan nilai tambah produk dan pengembangan pasar. Dalam Sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja memerlukan pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta mengakomodasi peranan daerah yang lebih besar terhadap perencanaan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan adalah dengan dibangunnya sistem *e-Proposal*. Dengan adanya penerapan aplikasi *e-Proposal* dalam proses perencanaan diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang masuk ke tingkat pusat, sehingga anggaran dapat teralokasikan dengan tepat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan dan penganggaran. Dalam perencanaan pembangunan pertanian beberapa tantangan kedepan dibidang pangan dan pertanian, antara lain: pertumbuhan penduduk, pemenuhan gizi seimbang, perubahan iklim, digitalisasi industry 4.0, ketersediaan lahan dan air, impor pangan, subsidi tidak tepat, regenerasi petani, stabilitas harga sampai dengan akses pangan yang baik, dan lain sebagainya. Dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 sektor pertanian diberikan target pertumbuhan PDB sebesar 3,8-3,9% dengan fokus pada program prioritas nasional “Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan”. Kementerian Pertanian pada Renstra 2020-2024 memiliki sasaran yaitu “Pertanian Maju, Mandiri dan Modern. Melalui strategi Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Mewujudkan Ketahanan Pangan, dan Meningkatkan Daya Saing Komoditas Pertanian.

Data rekapitulasi Program, Kegiatan dan komponen Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020 (tabel 1) dan Tahun 2021 (tabel 2) sebagai berikut:

Tabel 1

Program/Kegiatan/Komponen Ditjen Tanaman Pangan TA 2020

PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN		VOLUME/SATUAN	
I.	PENGLOLAAN ANEKA KACANG UMBI (1761)		
1.	a. Peningkatan Produksi kedelai	80.626	Ha
2	Pilot Project Show Windows Kawasan Kedelai	1	Pkt
3	Manajemen Kawasan Korporasi	2.000	Ha
4	Pengembangan Ubi Jalar di Papua & Pabar	225	Ha
5	Peningkatan Produksi Akabi Lainnya	49.659	Ha
	a. Kacang Tanah	9.987	Ha
	b. Ubi Kayu	11.175	Ha
	c. Kacang Hijau	10.356	ha
	d. Ubi jalar	140	ha
	e. Umbi porang	17.901	Ha
	f. Talas	100	Ha
II.	PENGLOLAAN PRODUKSI SEREALIA (1762)		
	Peningkatan Produksi PADI	700.697	Ha
1	Lahan Kering/Tadah Hujan	209.450	Ha
2	Padi di Merauke (Kepres)	11.000	Ha
3	Padi Organik	4.750	Ha
4	Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	10.000	Ha
5	Padi Rawa	165.902	Ha
6	Padi Khusus	5.115	Ha
7	Padi Bebas Residu	29.480	Ha
8	Kawasan Padi (PATB)	250.000	Hektar
9	Pengembangan Padi (PIP)	15.000	Hektar
	JAGUNG	3.000	Ha
10	Manajemen Kawasan Korporasi	50.000	Ha
11	Demplot Show Window Jagung (major project)	1	Pkt
12	Kerjasama pengembangan jagung	3.000	Ha
13	Pengembangan Budaya Shorgum	3.500	Ha
III	PENGLOLAAN SISTEM PERBENIHAN (1763)		
	BANTUAN BENIH JAGUNG	1.399.091	
1	Bantuan Benih Jagung	1.399.091	Ha
	a. Varietas Umum 2	450.000	Ha
	b. Varietas Umum 3	949.091	Ha
2	Korporasi benih jagung Hibrida	2.500	Ha
3	Korporasi Jagung Komposit	100	Ha
4	Pemberdayaan Produsen Benih Kedelai (1 unit = 10 Ha)	3	Unit
5	Pemberdayaan Produsen Benih Padi (1 unit = 10 Ha)	6	Unit
6	Pengemb Produsen Benih Korporasi Kacang Tanah, Kacang Hijau dan Serealia Lainnya	680	Ha
7	Pengembangan Produsen Benih Padi Inbida (Korporasi)	6.094	Ha
8	Pilot Project Korporasi Perbenihan Padi Hibrida	75	Ha
9	Pilot Project Korporasi Perbenihan Kedelai	1.178	Ha
	BANTUAN BENIH PADI	1.954.303	Ha
10	Bantuan Benih Padi Inbida	1.954.303	Ha
11	Manajemen Kawasan Korporasi padi	600.000	Ha
12	Demplot Show Window Padi (major project)	3	Pkt
13	Bantuan Padi Hibrida	10.000	Ha
14	Perbanyak Benih Sumber Padi (305 Ha)	915.000	Kg
15	Perbanyak Benih Sumber Jagung (63 Ha)	63.000	Kg
16	Perbanyak Benih Sumber Kedelai (101 Ha)	121.200	Kg
17	Perbanyak Benih Sumber Palawija Lain (52 Ha)	52.000	Kg
18	Perbanyak Benih Sumber Aneka Umbi (12 Ha)	120.000	Stek
19	Sertifikasi benih dan Pengembangan Varietas (BPSB)	124.500	Ha
20	Pengawasan peredaran benih (BPSB)	150.000	Ton
IV	PERLINDUNGAN TANAMAN DR GANGGUAN OPT/DPI (1764)		
1	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu	24.172	Ha
2	Honor dan BOP Petugas POPT	3.874	Org
3	Penguatan BPTPH, LPHP dan BPT dan Lab Pestisida	230	Unit
4	Sarana Kerja Petugas POPT	4.027	Org
5	Penerapan Penanganan DPI	550	Ha
6	Sarana Pengendalian OPT	83.500	Ha
7	Sarana penanganan DPI		
8	Upaya Penanganan Kekeringan	1	Paket
9	Pembinaan, pengawasan, monev (Pusat)	33	Prov
10	Pembinaan RPH dan PPAH	46	Kali
11	Pengujian Mutu produk (BPMPPT)	1.970	LHP
V	PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL TP (PPHTP)		
1	Sarana Pascapanen Tanaman Pangan & RMU	8.450	Unit
2	Sarana Pengolahan Hasil TP	126	Unit
3	Sertifikasi Jaminan Mutu	31	smpl
4	Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	370	info

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan TA 2020 (diolah)

Tabel 2

Rincian Output Ditjen Tanaman Pangan TA. 2021

No	Jenis Kegiatan TA. 2021	Volume	Satuan
1	Pengembangan Padi	2.801.000	Hektar
2	Pengembangan Jagung	2.124.299	Hektar
3	Pengembangan Kedelai	479.330	Hektar
4	Pengembangan Ubi Kayu	15.000	Hektar
5	Pengembangan Ubi Jalar	2.000	Hektar
6	Pengembangan Kacang Tanah	500	Hektar
7	Pengembangan Kacang Hijau	5.000	Hektar
8	Pengembangan Porang	100	Hektar
9	Pengembangan Talas	500	Hektar
10	Pengembangan Shorgum	5.000	Hektar
11	Alsin Pasca Panen	8.128	Unit
12	Alsin Pengolahan Hasil	145	Unit
13	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	39.320	Hektar
14	Areal Penanganan DPI	15.600	Hektar
15	Sertifikasi Produk (BPMPT)	1.250	LPHP
16	Peramalan OPT & Model Pertanian Modern (BBPOPT)	10	Model
17	Perbanyak Benih (BBI), Penangkar, Produsen Benih Tanaman Par	14.505	Hektar
18	Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan (BPSB)	126.468	Hektar
19	Pengujian Mutu Benih (BBPPMBTPH)	10	Metode

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan TA. 2021 (diolah)

Dari tabel 1 dan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa fokus utama kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah pada 7 komoditas utama yaitu: Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau. Selain 7 komoditas utama tersebut, untuk meningkatkan diversifikasi pangan, dikembangkan juga komoditas pangan lokal misalnya Porang, Talas, dan Sorgum.

Pada era globalisasi dan reformasi seperti saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan sangat penting untuk diperhatikan oleh pelaksana pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, selain itu juga membantu pemerintah untuk

memperoleh masukan dari masyarakat untuk memperbaiki sistem kinerja dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka dari itu, pemerintah akan dituntut untuk selalu melakukan perubahan atau perbaikan dalam segala aspek, termasuk aspek sistem perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah sangat memperhatikan terkait tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dalam hal proses perencanaan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*. Kementerian Pertanian merupakan salah satu elemen dalam pemerintahan Republik Indonesia yang telah mengembangkan sistem perencanaan pembangunan pertanian berbasis aplikasi online yang disebut dengan *e-Proposal*. Aplikasi ini telah dikembangkan sejak tahun 2014 yang merupakan salah satu mekanisme perencanaan yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis *e-Planning*. Selanjutnya, Peraturan Menteri tersebut sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

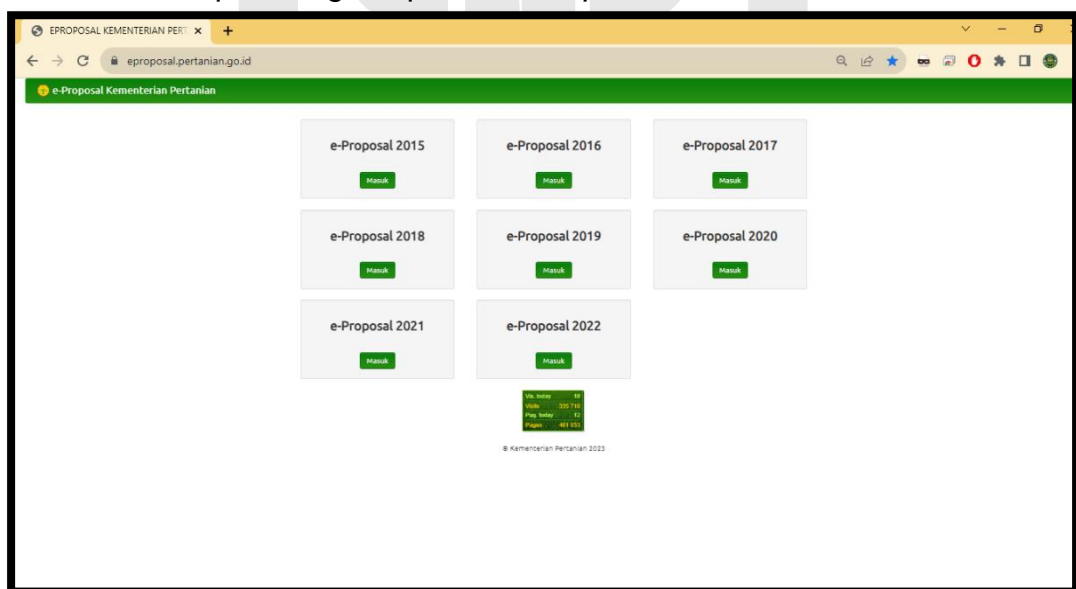
Menindaklanjuti implementasi Peraturan Menteri Pertanian tersebut, salah satunya adalah pengembangan aplikasi *e-Proposal*. Kebijakan pembangunan pertanian khususnya subsektor tanaman

pangan dalam aspek perencanaan dilaksanakan dengan mekanisme *top down policy* dan *bottom up planning*. Hal tersebut mempunyai maksud untuk menyelaraskan perencanaan pusat dengan daerah. Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut dijelaskan mengenai kebijakan dan mekanisme perencanaan berbasis situs *web online* untuk memudahkan pengolahan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan saat ini, pelaksanaan dan operasional *e-Proposal* terus mengalami perkembangan, perbaikan dari segala aspek terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan sehingga tepat sasaran dan dapat di pertanggungjawabkan. Perbaikan tersebut meliputi dari aspek mekanisme pengusulan, kebutuhan data yang harus dilengkapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memastikan bahwa lokasi calon penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan yang diusulkan OPD harus mencantumkan sampel titik koordinat yang diambil dengan menggunakan aplikasi *Open Camera*. Secara umum, dari tahun 2014 sampai dengan saat ini, aplikasi *e-Proposal* mengalami perubahan dalam aspek kualitas usulan dan aspek perencanaan baik di pusat dan di daerah. Dari tahun 2014 – 2022 aplikasi *e-Proposal* dapat diakses melalui laman: <https://eproposal.pertanian.go.id/> (Gambar 1), sedangkan mulai Tahun Anggaran 2023 terjadi integrasi beberapa aplikasi ke dalam satu

aplikasi besar yang didalamnya ada beberapa aplikasi yang sudah terintegrasi. Aplikasi tersebut adalah “*Business Intelligence Management Agriculture*” (BIMA). Sistem BIMA dapat dibuka melalui web browser (Internet Explore, Mozila FireFox, Chrome, dan Safari) dengan alamat domain <https://bima.pertanian.go.id/> (Gambar 2).

Gambar 1
Tampilan *Log-in* aplikasi *e-Proposal* Kementerian Pertanian

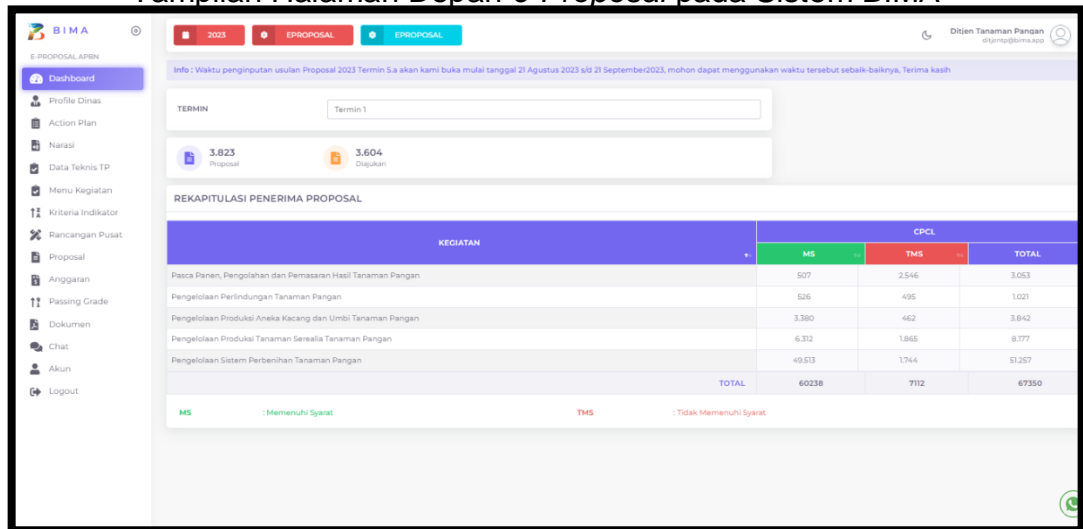


Sumber: <https://eproposal.pertanian.go.id/>

Gambar di atas adalah tampilan halaman masuk aplikasi *e-Proposal* untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2022. Pada rentang waktu tahun tersebut aplikasi *e-Proposal* belum terintegrasi dengan aplikasi yang lain sehingga untuk dapat menggunakan data dari hasil penilaian pada aplikasi *e-Proposal* harus melakukan *input/entry* kembali sehingga kurang efektif dan menyita banyak waktu.

Gambar 2

Tampilan Halaman Depan *e-Proposal* pada Sistem BIMA



Sumber: <https://bima.pertanian.go.id/eproposal/dashboard/index>

Gambar di atas adalah tampilan *login* aplikasi *e-Proposal* yang sudah terintegrasi dalam aplikasi BIMA, data dalam aplikasi BIMA sudah saling terintegrasi antar aplikasi sehingga lebih memudahkan untuk memfasilitasi kebutuhan data pada aplikasi lainnya dalam kaitannya dalam tahapan proses penyusunan perencanaan di Kementerian Pertanian.

Apabila kita berbicara tentang permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan *e-Proposal*, masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki diantaranya (1) kualitas usulan yang masih belum memperhatikan potensi dan kebutuhan sesuai dengan kondisi di tingkat lapang atau potensi yang ada di wilayah tersebut, (2) kesalahan pada saat pengentrian oleh operator daerah, sehingga mengakibatkan kualitas usulan kurang akurat, (3) sering terjadi pergantian operator

aplikasi. Contoh usulan yang tidak memperhatikan potensi daerah dapat dilihat pada tabel 3 - 5.

Tabel 3

Contoh Usulan e-Proposal dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang TA. 2020

No	Noreg	Propinsi	Kabupaten	OPD	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Komoditas lainnya	Dukungan APBD Kab/Kota	Disetujui Ke Provinsi	Penilaian Provinsi	Volume
61		JAWA BARAT	KARAWANG	Dinas Pertanian Kabupaten Karawang	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Fasilitas Penyaluran Budidaya Padi Bebas Residu	Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya padi bebas residu	Fasilitas Sarana Budidaya Padi Bebas Residu (Hektar)	Tanaman Pangan	Padi			Belum	Belum dinilai	500
62		JAWA BARAT	KARAWANG	Dinas Pertanian Kabupaten Karawang	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Fasilitas Penyaluran Budidaya Padi Khusus Lainnya	Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya padi khusus lainnya	Fasilitas Sarana Budidaya Padi Khusus Lainnya (Hektar)	Tanaman Pangan	Padi			Belum	Belum dinilai	50
63		JAWA BARAT	KARAWANG	Dinas Pertanian Kabupaten Karawang	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	Tanpa Sub Output	Melaksanakan Penyaluran Benih Bersertifikat	Bantuan Benih Padi Inbrida Lahan Kering (Hektar)	Tanaman Pangan	Padi			Belum	Belum dinilai	175

Sumber: <https://eproposal.pertanian.go.id/eprop20/>

Contoh usulan yang terlambat/lalai diajukan ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat sehingga usulan tersebut tidak dapat di proses ke tahap selanjutnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh pergantian operator aplikasi di Dinas Pertanian Karawang atau kurangnya koordinasi antar bidang.

Tabel 4

Contoh Usulan e-Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa TA.

No	Noreg	Propinsi	Kabupaten	OPD	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Komoditas lainnya	Dukungan APBD Kab/Kota	Disetujui Ke Provinsi	Penilaian Provinsi	Volume
1	706/300719/76/2020	SULAWESI BARAT	MAMASA	Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Sawah	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Sawah (Hektar)	Tanaman Pangan	Padi			Sudah	Telah diverifikasi (layak diusulkan ke pusat)	10.000
2	706/300719/76/2020	SULAWESI BARAT	MAMASA	Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 1	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Varietas Umum 1	Fasilitas Sarana Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 1 (Hektar)	Tanaman Pangan	Jagung			Sudah	Telah diverifikasi (layak diusulkan ke pusat)	15.000
3	706/300719/76/2020	SULAWESI BARAT	MAMASA	Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	Fasilitas Penerapan Budidaya Minapadi	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Minapadi	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Minapadi (Hektar)	Tanaman Pangan	Padi		2.850.000	Sudah	Telah diverifikasi (layak diusulkan ke pusat)	250.000

Contoh Usulan e-Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Provinsi NTB TA. 2019

No	Noreg	Propinsi	Kabupaten	OPD	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Sub sektor	Komoditas	Komoditas lainnya	Dukungan APBD Kab/Kota	Diusulkan Ke Provinsi	Penilaian Provinsi	Volume
56	349/020718/52/2019	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN KABUPATEN BIMA	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerimaan Budidaya Padi	Fasilitas Penerimaan Budidaya Padi Inbrida	Melaksanakan Penyuluhan Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Sawah	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Sawah (Hektar)	Tanaman Pangan	Padi		50.000.000	Sudah	Belum dinilai	900.000.000
57	349/020718/52/2019	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN KABUPATEN BIMA	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerimaan Budidaya Padi	Fasilitas Penerimaan Budidaya Padi Hibrida	Melaksanakan Penyuluhan Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Hibrida	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Hibrida (Hektar)	Tanaman Pangan	Padi		100.000.000	Sudah	Belum dinilai	1.000.000.000
58	349/020718/52/2019	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN KABUPATEN BIMA	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerimaan Budidaya Padi	Fasilitas Penerimaan Budidaya Padi Gogo	Melaksanakan Penyuluhan Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Gogo	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Gogo (Hektar)	Tanaman Pangan	Padi		100.000.000	Sudah	Belum dinilai	1.000.000.000
59	349/020718/52/2019	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN KABUPATEN BIMA	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerimaan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	Fasilitas Penerimaan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 1	Melaksanakan Penyuluhan Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Varietas Umum 1	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Varietas Umum 1 (Hektar)	Tanaman Pangan	Jagung		100.000.000	Sudah	Belum dinilai	800.000.000
60	349/020718/52/2019	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN KABUPATEN BIMA	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Fasilitas Penerimaan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	Fasilitas Penerimaan Budidaya Jagung Hibrida Litbang	Melaksanakan Penyuluhan Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Litbang	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Litbang (Hektar)	Tanaman Pangan	Jagung		100.000.000	Sudah	Belum dinilai	700.000.000
61	349/020718/52/2019	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN KABUPATEN BIMA	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Fasilitas Penerimaan Budidaya Kacang dan Kedelai	Tanpa Sub Output	Melaksanakan Penyuluhan Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kacang dan Kedelai	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kacang dan Kedelai (Ha)	Tanaman Pangan	Kedelai		100.000.000	Sudah	Belum dinilai	22500
62	349/020718/52/2019	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAHAN KABUPATEN BIMA	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Fasilitas Penerimaan Budidaya Kacang Tanah	Tanpa Sub Output	Melaksanakan Penyuluhan Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kacang Tanah	Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kacang Tanah (Ha)	Tanaman Pangan	Kacang Tanah		900.000.000	Sudah	Belum dinilai	50.000.000

Sumber: <https://eproposal.pertanian.go.id/eprop19/>

Pada tabel di atas dapat dijelaskan yaitu contoh usulan e-Proposal Tahun 2019 dan 2020 dari Dinas Pertanian kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Dapat dilihat pada kolom volume usulannya tidak realistis dalam satu kabupaten mengusulkan ratusan juta hektar, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang disebabkan kurangnya koordinasi antar pelaku atau antar unit organisasi. Pelaksanaan perencanaan dari sebelum berbasis elektronik sampai dengan saat ini, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan *e-Proposal*

No.	Sebelum penerapan eProposal	Setelah Penerapan eProposal
1	K/L wajib membangun e-government (langkah Reformasi Birokrasi : <i>e-office, e-procurement, e-planning, e-budgetting, e-performance, e-audit</i>)	Penerapan ePlanning lingkup Kementerian Pertanian
2	Jalur proposal tidak jelas (kab ↔ pusat)	Jalur jelas (kab ↔ prov ↔ pusat), proses Top Down Policy dan Bottom-up Planning
3	Tidak terkoordinasi antar Eselon I	Proposal satu pintu Kementan
4	Format dan isi beragam, tidak menjamin kebutuhan	Format terstandar dan ringkas
5	Waktu tidak terjadwal/ tidak teratur	Terjadwal dengan dibagi dalam beberapa Termin
6	Hardcopy, menumpuk di pusat, sulit dilacak	Softcopy, paperless, mudah dilacak
7	Tidak ada standar penilaian proposal	Standarisasi penilaian (akuntabel dan transparan)

No.	Sebelum penerapan eProposal	Setelah Penerapan eProposal
8	Persepsi: mengantar proposal pasti mendapat anggaran dan banyak proposal “titipan”.	Tidak diperlukan bertemu muka pengirim dan penerima proposal.
9	Belum dibangun sistem database di level kelompok tani, desa dan kecamatan,	Dibangun database
10	Tidak mencerminkan keterpaduan kawasan	Mendukung pengembangan kawasan

Dari tabel di atas dapat disampaikan beberapa perubahan yang terjadi kearah yang lebih efektif dan akuntabel dalam tahapan penyusunan perencanaan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan perencanaan **Top Down Policy** dan **Bottom-up Planning** menjadi jelas yaitu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota – OPD Provinsi – Kementerian/Pusat.
2. Sebelum adanya *e-Proposal*, usulan dari daerah sering tidak tepat tujuan dan sasaran, misalnya proposal untuk kegiatan yang memerlukan dukungan lintas Eselon I tidak sampai kepada seluruh unit kerja terkait, sehingga sangat berpengaruh pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA K/L.

3. Sebelum adanya *e-Proposal*, format proposal sangat beragam dan sering tidak fokus kepada apa yang menjadi usulannya. Setelah adanya *e-Proposal* usulan menjadi seragam dan dalam satu format yang sama sehingga mudah untuk melakukan identifikasi.
4. Sebelum adanya *e-Proposal*, waktu/jadwal pengusulan tidak teratur. Usulan proposal baru dikirim pada saat semester kedua tahun berjalan sehingga sangat tidak efektif. Setelah adanya *e-Proposal*, waktu pengusulan diatur dalam beberapa Termin, disesuaikan dengan tahapan penyusunan anggaran.
5. Sebelum adanya *e-Proposal*, proposal berupa paper kertas yang sangat tebal membutuhkan ruang yang besar untuk penyimpanan dan arsip, sangat sulit untuk mencari proposal terutama yang sudah lewat tahun. Setelah adanya *e-Proposal*, proposal berupa *softcopy*, *paperless* dan mudah untuk dilacak serta tidak membutuhkan *space* ruang yang besar.
6. Sebelum adanya *e-Proposal*, tidak ada standar penilaian proposal yang masuk dan sulit menentukan antara yang layak dan yang tidak. Setelah adanya *e-Proposal* terdapat kriteria penilaian *e-Proposal* dan berjenjang dari Kabupaten/Kota – Provinsi – Pusat, sehingga lebih transparan dan akuntabel.
7. Setelah adanya *e-Proposal* tidak ada lagi istilah proposal “titipan”, semua usulan proposal melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dan melalui tahapan-tahapan yang jelas.

Perbandingan di atas adalah kondisi yang diharapkan dengan diterapkannya sistem pengusulan bantuan pemerintah menggunakan aplikasi *e-Proposal*, namun berdasarkan observasi awal dan wawancara secara non formal dengan beberapa narasumber yang dalam hal ini adalah Pejabat dan Operator Aplikasi *e-Proposal* baik di pusat dan di daerah telah ditemukan beberapa indikasi masalah dalam implementasi kebijakan tersebut. Permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Seiring berkembangnya teknologi dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, aplikasi *e-Proposal* setiap tahunnya dituntut dapat menyesuaikan dan dapat menjawab tantangan tersebut;
2. Sering terjadi pergantian operator *e-Proposal* di daerah sehingga menghambat pengusulan, misalnya kurangnya transfer pengetahuan kepada petugas baru sebelum petugas yang lama pindah tugas/pensiun;
3. Dinas Provinsi lalai/kurang koordinasi dan komunikasi antar bidang dalam melakukan verifikasi usulan, sehingga usulan dari dinas pertanian kabupaten/kota tidak dapat diteruskan ke pusat. Koordinasi antar bidang dan sekretariat di OPD dalam pengusulan *e-Proposal* perlu ditingkatkan;
4. Terjadinya serangan *malware* yang menyerang database di Kementerian Pertanian yang mengakibatkan sebagian data penting

sebagian hilang, hal ini terjadi di Kementerian Pertanian pada tahun 2021-2022;

5. Usulan *e-Proposal* yang tidak logis/usulan sangat besar dan tidak mempertimbangkan potensi lahan dan dalam hal ini peranan tim verifikasi provinsi sangat penting; dan
6. Adanya kebijakan *Refocusing* yaitu menambah kegiatan/output baru sehingga OPD harus mengusulkan sesuai alokasi Perubahan pada saat *e-Proposal* dibuka kembali.

Beberapa hasil penelitian terdahulu Asyhadi Laksono Hakim dalam jurnal Identifikasi Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi Kementerian Pertanian (tt:4) "*e-Proposal* atau Elektronik Proposal adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Kementerian Pertanian (Eselon 1 & 2), Tingkat Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, dan seluruh satuan kerja (satker) yang mendukung pertanian. Untuk mengajukan kegiatan di tiap satker, anggaran dan dana pembantuan dari Kementerian Pertanian. Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database Mysql".

Dalam jurnal tersebut belum membahas secara lengkap tentang bagaimana implementasi kebijakan perencanaan berbasis elektronik menggunakan aplikasi *e-Proposal*. Dalam jurnal tersebut baru membahas terkait tujuan dibangunnya aplikasi *e-Proposal*,

sehingga masih diperlukan penelitian untuk menggali lebih dalam terkait pelaksanaan dan kendala di lapangan tentang kebijakan tersebut. Sedangkan dari hasil penelitian jurnal lainnya yang dilakukan oleh Virgiana Ningsih, et.al. (2018: 28-29) dengan judul Analisis Penerapan *E-Planning* dan *E-Budgeting* Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Beberapa kendala yang disampaikan dalam penelitian tersebut antara lain:

- a. Masih terdapat perbedaan regulasi yang mengatur urusan yang dilaksanakan daerah dengan regulasi yang mengatur program yang harus dilaksanakan daerah;
- b. Aplikasi masih memiliki kekurangan sehingga berdampak pada proses kerja admin yang ada di Bappeda Kabupaten Bengkalis;

Dari kendala tersebut, peneliti memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis antara lain:

- c. Pemerintah harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), mungkin dengan cara melakukan pelatihan, menempatkan ASN yang berkompeten pada posisi yang tepat maupun dengan belajar dari daerah lain yang telah berhasil dalam penerapan ini;
- d. Mempersiapkan infrastruktur yang terkait dengan penerapan sistem ini;
- e. Pemerintah harus segera merampungkan aturan terkait dengan SOP penerapan *e-planning* dan *e-budgeting*;

f. Semua pihak harus turut andil dan bekerja sama dengan cara melaksanakan tupoksi masing-masing secara maksimal

Dari beberapa saran yang diberikan dalam penelitian tersebut belum disampaikan secara teknis apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan terbatas pada satu kabupaten saja sehingga belum mencerminkan kondisi implementasi penerapan *e-planning* secara nasional sehingga peneliti beranggapan bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi, kendala dan strategi untuk mengatasinya dilihat dari cakupan skala nasional.

Pada hasil penelitian lainnya yang disampaikan oleh Wayan Dedi Juniawan (2019: 292) dalam jurnal Sistem Perencanaan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar) dalam kesimpulannya:

a. Penyusunan Perencanan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023 telah mengadopsi sistem perencanaan pembangunan terintegrasi sesuai yang dikemukakan oleh Geyer (2006:1); dimana setiap fasenya bersesuaian dengan tahapan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Setiap tahapan penyusunan pada RPJMD pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sudah merupakan bagian dalam fase sistem perencanaan pembangunan terintegrasi, walaupun pada setiap tahapannya tidak

berurutan dalam setiap fase sistem PPT. *E-Planning* berperan pada fase 0 (persiapan) dalam mengumpulkan data dan informasi pembangunan yang ditetapkan oleh peraturan, fase 2 (strategi) pada saat pemasukan dan verifikasi usulan Musrenbang RPJMD, serta fase 4 (integrasi), yaitu mengintegrasikan misi, tujuan, sasaran, sampai pada program daerah dengan program pada Renstra Perangkat Daerah; dan

- b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul adalah faktor teknis (infrastructure TIK, keamanan, output dan fitur sistem, SOP, dan pelatihan teknis) dan faktor sosial/ organisasi (komitmen pimpinan, budaya kerja, komunikasi dan SDM pelaksana). Satu faktor dapat menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat proses implementasinya. Faktor teknis yang termasuk faktor pendukung, adalah infrastruktur TIK, keamanan, output dan fitur sistem. Sementara kelima faktor lainnya dapat berperan sebagai faktor penghambat. Faktor sosial/ organisasi dari keempat faktor yang ada memiliki kontribusi menjadi faktor pendukung dan penghambat.

Namun pada penelitian lain Apriliani Sekar. A. et.al. (2022:262) dalam jurnal dengan judul Pengaruh *E-Planning*, *E-Budgeting*, dan *E-Procurement* Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, pada kesimpulannya menyampaikan bahwa:

“Variabel *E-Planning* dan *E-Budgeting* tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Jawa Tengah. namun sebaliknya, untuk variabel *E-Procurement*, memberi bukti empiris pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah. Praktik *E-Planning* dan *E-Budgeting E-Procurement* di Jawa Tengah masih sangat rendah, sehingga SAKIP tidak bisa terpengaruh. Terkait temuan hasil riset ini, dari berbagai sudut pandang baik secara grand theory agar dapat menjadi rekomendasi perbaikan bagi pengambilan kebijakan publik atau untuk pengembangan teoritik, yaitu untuk lebih menekankan riset ke depan pada faktor yang bisa mendorong daerah untuk punya *political will* dalam menerapkan *e-government* secara maksimal. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu *E-Planning*, *E-Budgeting*, *E-Procurement*, kurangnya sebaran data 2021 karena keterbatasan data Skor SAKIP di tahun 2021 dan tidak lengkapnya informasi data *E-government* (*E-Planning*, *E-Budgeting*, *E-Procurement*) pada GRMS masing masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, peneliti mendapatkan gambaran atau inspirasi untuk melakukan penelitian dengan cakupan data tingkat nasional dalam kaitannya dengan

implementasi *E-Planning* atau sistem perencanaan secara elektronik pada Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perencanaan Pertanian di Unit Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan judul “Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis Elektronik (Studi Kasus Pada Pengusulan Program dan Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Aplikasi *E-Proposal* Pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian)”.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakannya?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan?
3. Apa Strateginya Untuk Mengatasi Permasalahan Dalam Implementasi Kebijakan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi, Faktor-faktor yang menjadi penghambat, dan Strategi untuk mengatasi

permasalahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis Elektronik (Studi Kasus Pada Pengusulan Program dan Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Aplikasi *E-Proposal* Pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat terhadap dunia akademik

1. Melalui penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan keilmuan tentang Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis Elektronik (Studi Kasus Pada Pengusulan Program dan Anggaran Bantuan Pemerintah Melalui Aplikasi *E-Proposal* Pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian).
2. Menjadi masukan kepada setiap pembaca akan pentingnya suatu inovasi dalam pelaksanaan pemerintahan.
3. Sebagai bahan informasi bagi pembaca dalam membuat tulisan.

b. Manfaat terhadap dunia praktis

Untuk memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran dan saran atas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis Elektronik di Unit Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, akuntabilitas, dan transparansi dalam perencanaan program, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Dalam mengembangkan sistem aplikasi berbasis online, pastinya harus selalu ada inovasi-inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan beberapa aspek lain yang berpengaruh.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**